



NEWSLETTER PUSDATIN

EDISI AGUSTUS 2019

TRIWULAN II 2019 PDB PERTANIAN TUMBUH LUAR BIASA



Dalam empat tahun terakhir kinerja PDB Sektor Pertanian sangat baik. Hal ini terlihat pada tahun 2017-2018 PDB Sektor Pertanian tumbuh positif sebesar 3,7% dan diatas target yang ditetapkan sebesar 3,5%.

Demikian juga pada awal tahun ini (2019). Menurut data yang dirilis BPS (5/8/2019) pada Triwulan II tahun 2019, PDB Sektor Pertanian (tidak termasuk Kehutanan dan Perikanan) mampu tumbuh sebesar 5,41% dan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Sektor Pertanian pada Triwulan II tahun 2017 dan 2018 yang tumbuh masing-masing 3,00% dan 5,01%.

Selain itu, yang membanggakan pada Triwulan II tahun ini bahwa semua PDB subsektor juga tumbuh positif. Seperti PDB Subsektor tanaman pangan tumbuh 5,13%, Subsektor Hortikultura tumbuh 6,11%, Subsektor Tanaman Perkebunan tumbuh 4,45%, dan Subsektor

Bersambung Ke Halaman 2 ...

DAFTAR ISI

- 1 Triwulan II 2019 PDB Pertanian Tumbuh Luar Biasa
- 2 Peran Nyata Sektor Pertanian Dalam Mengurangi Kemiskinan
- 3 Kinerja Ekspor Karet Semakin Membaik
- 4 Kementan Sukses Membumikan Nawacita
- 5 Program Kementan Mengurangi Resiko Gagal Panen Akibat Kekeringan
- 7 Koordinasi dan Sosialisasi Pendataan Sapi / Kerbau Secara Online di Provinsi Jaa Timur 24 Juni - 6 Juli 2019
- 9 kemandirian Informasi, Aja Yuk !
- 10 Pemanfaatan Web Service untuk Penyediaan Data di kementerian Pertanian
- 12 Info Data Petanian

Peternakan tumbuh 7,78%. Pertumbuhan yang lebih tinggi dari Triwulan II tahun-tahun sebelumnya ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian semakin membaik. Hal yang menarik juga untuk dicermati lebih lanjut adalah membaiknya kinerja subsektor tanaman pangan pada Triwulan II tahun ini secara tidak langsung sebenarnya menunjukkan bahwa produksi dan ketersediaan pangan dalam negeri terus membaik, sehingga tidak perlu diragukan lagi.

Membaiknya kinerja dan pertumbuhan PDB Sektor Pertanian pada Triwulan II tahun ini menyebabkan kontribusi PDB Sektor Pertanian (arti luas) terhadap PDB Nasional membaik dan menduduki urutan kedua dibawah Sektor Industri, dan atas perdagangan, konstruksi dan pertambangan.

Membaiknya kinerja PDB Sektor Pertanian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah melalui Kementan dalam

meningkatkan produksi pertanian secara signifikan. Pada Subsektor Tanaman Pangan, program terobosan UPSUS Pajale telah mampu meningkatkan produksi padi dan jagung secara signifikan. Dalam Subsektor Hortikultura Pemerintah melalui Kementan mendorong peningkatan produksi hortikultura melalui bantuan benih unggul dan kebijakan pengendalian impor. Sementara dalam subsektor peternakan, pemerintah memacu peningkatan produksi dan populasi ternak sapi dan kerbau melalui program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus SIWAB) sehingga mampu meningkatkan populasi ternak hampir 3,8 juta ekor. Kementan juga menyiapkan program terobosan dalam 5 tahun ke depan yaitu Bun500 untuk penyediaan sebanyak 500 juta batang benih unggul perkebunan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan 2-3 kali dari sekarang. (Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si)

PERAN NYATA SEKTOR PERTANIAN DALAM MENGURANGI KEMISKINAN



Keberhasilan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dalam empat tahun terakhir (2014-2018) tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dengan cepat dapat dilihat dari menurunnya jumlah penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan dari tahun ke tahun. Pada Maret 2013 jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sekitar 11,36% (28,17 juta jiwa) dari 248 juta jiwa penduduk Indonesia, dan terus berangsur-angsur turun dan menembus angka satu digit (9,82%) pada Maret 2018.

Pada September 2018 turun lagi menjadi 9,66%. Menurut data yang dirilis terakhir oleh BPS (15/7/2019), jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 kembali turun menjadi 9,41% (25,14 juta jiwa) dari sekitar 267 juta jiwa penduduk Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di perdesaan juga menurun secara signifikan. Pada Maret 2013 masih sekitar 14,32%, dan pada Maret 2018 turun menjadi 13,20% dan turun lagi menjadi

13,10% pada September 2018. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di perdesaan kembali menurun menjadi 12,85%. Capaian penurunan jumlah penduduk miskin ini tentunya tidak terlepas dari ketepatan pemerintah khusus Kementerian Pertanian dalam memilih program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui perbaikan pendapatan maupun peningkatan pasokan pangan dari produksi dalam negeri.

Menurut BPS (2019), selain terjadinya peningkatan rata-rata upah riil buruh tani dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta pelaksanaan program Rastra sesuai jadwal, menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia karena terjadinya penurunan harga eceran beberapa komoditas pokok. Menurun dan stabilnya harga pangan pokok ini mempunyai peran nyata terhadap pengurangan kemiskinan, mengingat kontribusi komoditas pangan terhadap penurunan kemiskinan mencapai 73%.

Membaiknya pasokan pangan dari produksi dalam negeri menyebabkan selama periode September 2018 sampai dengan Maret 2019 harga daging ayam ras turun 1,85%; harga minyak goreng turun 2,12%; harga gula pasir turun 1,22%; harga cabai rawit turun 11,21%; dan harga cabai merah turun 10,35%. Selain

itu, menurunnya jumlah penduduk miskin secara signifikan ini juga akibat harga beras sebagai kontributor utama (20% - 26%) terhadap penurunan kemiskinan relatif sangat stabil dan bahkan cenderung menurun sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi membaik. Membaiknya daya beli masyarakat terhadap pangan menyebabkan sebagian penduduk yang tadinya masuk kelompok miskin berubah statusnya menjadi penduduk sejahtera. Hal ini lagi-lagi membuktikan bahwa pemerintah dalam empat tahun terakhir mampu memproduksi pangan, khususnya padi/beras secara baik.

Dengan demikian, tampak dengan jelas bahwa sektor pertanian mempunyai peran strategis dan nyata dalam menurunkan kemiskinan melalui peningkatan pasokan pangan dalam negeri. Khusus masyarakat perdesaan, dimana penduduknya sebagian besar sebagai petani dengan pendapatan utamanya hampir 70% berasal dari sektor pertanian, maka peran sektor pertanian dalam mengurangi kemiskinan tidak hanya sebatas peningkatan penyediaan pangan melalui peningkatan produksi, tapi pada saat yang sama juga berperan untuk peningkatan pendapatan rumah tangga petani.

(Dr. Ir. I ketut kariyasa, M.Si)

KINERJA EKSPOR KARET SEMAKIN MEMBAIK

Karet merupakan salah satu komoditas unggulan subsektor perkebunan dan menjadi penyumbang surplus kinerja perdagangan komoditas pertanian Indonesia. Dalam empat tahun terakhir, kinerja ekspor karet Indonesia semakin membaik. Selama tahun 2014-2018, ekspor karet meningkat sekitar 7,8%, dari 2,62 juta ton pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,81 juta ton pada tahun 2018. Pada tahun ini (2019), diperkirakan ekspor karet juga akan lebih dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Sampai pertengahan tahun 2019, jumlah ekspor karet sudah mencapai 2,25 juta ton.

Indonesia merupakan negara eksportir karet terbesar kedua dunia setelah Thailand, dan di atas Vietnam, dan Malaysia. Rata-rata pangsa pasar (market share) ekspor karet Indonesia adalah sebesar 29,28%. Sementara pangsa pasar ekspor karet dari Thailand sebesar 36,48%, Vietnam sebesar 7,77%, dan Malaysia 7,49%. Melalui Program Bun500 yang sedang

dilakukan oleh Kementan saat, dimana program ini menyediakan sebanyak 500 juta batang benih unggul perkebunan untuk memacu peningkatan produktivitas perkebunan termasuk karet menjadi 2-3 kali dari sekarang, maka bukan hal mustahil dalam 5 tahun ke depan Indonesia akan menjadi eksportir karet terbesar dunia. Sampai saat ini, Indonesia mengeksportir karet ke 62 negara. Lima negara tujuan utama ekspor karet Indonesia adalah Amerika Serikat dengan pangsa pasar 21,49%, disusul ke Jepang (17,15%), ke India (10,87%), ke China (8,96%), dan Korea Selatan (6,68%).

Sumatera Selatan merupakan sentra produksi karet di Indonesia. Hampir sebanyak 27,0% produksi karet Indonesia diproduksi di Sumatera Selatan. Provinsi sentra produksi karet berikutnya adalah Sumatera Utara (12,70%), Riau (10,16%), Kalimantan Barat (7,60%) dan Kalimantan Selatan (5,33%).
(Dr. Ir. I ketut kariyasa, M.Si)

KEMENTAN SUKSES MEMBUMIKAN NAWACITA

Salah satu butir pada agenda ke-7 dari Nawacita yang diusung oleh Pemerintahan Kabinet Kerja adalah Peningkatan Kedaulatan Pangan. Kedaulatan pangan ini dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang didukung dengan ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri, pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri, dan mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani.

Kementerian Pertanian dibawah kepemimpinan Amran Sulaiman melalui progam-program terobosan dan kebijakannya yang tepat dengan sukses telah mampu membumikan NawaCita tersebut dalam peningkatkan kedaulatan pangan. Hal ini terlihat dalam 4 tahun terakhir telah terjadi peningkatan produksi pertanian secara signifikan hampir pada semua komoditas. Pada saat yang sama juga kesejahteraan petani terus membaik dan berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat perdesaan, serta meningkatnya ekspor produk pertanian.

Membbaiknya daya beli atau kesejahteraan petani dalam empat tahun terakhir terlihat dari membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Menurut data yang dirilis BPS (tahun dasar 2012=100), selama periode 2014-2018, NTP terus meningkat dari 102,03 (2014) meningkat menjadi 102,46 (2018). Demikian halnya dengan NTUP, juga terus meningkat dan bahkan menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari NTP. Pada 2014 besarnya NTUP adalah 106,05 dan tahun 2018 meningkat menjadi 111,83.

Pemerataan pendapatan pada masyarakat juga terjadi yang ditandai oleh menurunnya Gini Ratio. Pada Maret 2013, secara nasional Gini ratio masih 0,424 dan pada Maret 2018 turun menjadi 0,389. Pada September 2018 pemerataan pendapatan kembali membaik yang ditandai oleh menurunnya Gini Ratio menjadi 0,384. Sejalan

pada tingkat nasional, ketimpangan pendapatan masyarakat di perkotaan dan perdesaan juga menurun. Namun demikian, yang cukup membanggakan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat perdesaan lebih baik dibandingkan di perkotaan, yang ditandai Gini Ratio di perdesaan selalu lebih rendah dari perkotaan. Pada Maret 2013, Gini Ratio di perkotaan 0,431 dan di perdesaan 0,320 dan pada Maret 2018 turun masing-masing menjadi 0,401 di perkotaan dan 0,324 di perdesaan. Pada September 2018, kembali turun masing-masing menjadi 0,391 di perkotaan dan 0,319 di perdesaan.

Selain itu, keberhasilan Kementan dalam membumikan NawaCita juga tampak dari keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Dalam empat tahun terakhir inflasi bahan makanan/pangan menurun secara konsisten. Pada tahun 2013, inflasi bahan makanan/pangan masih sangat tinggi, 11,35% dan pada tahun 2014 turun menjadi 10,57%. Pada tahun 2015 dan 2016, inflasi bahan makanan/pangan mulai mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu masing-masing menjadi 4,93% dan 5,69%. Bahkan pada tahun 2017 inflasi bahan makanan/pangan turun sampai tingkat 1,26% dan merupakan inflasi bahan makanan/pangan yang terendah yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia juga terus menurun. Pada Maret 2018, secara nasional jumlah penduduk miskin turun dan menembus angka satu digit (9,82%), dan pada September 2018 kembali turun menjadi 9,66%. Hal yang sama juga terjadi di perdesaan, pada Maret 2013 penduduk miskin masih tercatat 14,32%, pada Maret 2018 turun menjadi 13,20%, dan turun lagi pada September 2018 menjadi 13,10%.

Dalam kancah perdagangan internasional, ditengah lesunya ekspor Indonesia, justru dalam empat tahun terakhir ekspor produk pertanian meningkat pesat. Indonesia juga tercatat mengalami surplus dalam neraca

perdagangan produk pertanian. Selama tahun 2013-2018, volume ekspor produk pertanian Indonesia meningkat 26,9% atau rata-rata 5,4 per tahun, dari sekitar 33,5 juta ton tahun 2013 dan meningkat menjadi 42,5 juta ton tahun 2018.

Dengan memperhatikan capaian-capaian di atas maka tidak berlebihan kalau dikatakan Kementan mampu dengan baik membumikan NawaCita yang diusung oleh Pemerintahan

Kabinet Kerja saat ini. Apakah Kementan puas dengan capaian-capaian itu, tentunya tidak. Melalui kebijakan dan program-program terobosannya, Kementan terus berupaya untuk menggenjot produksi pertanian dalam penyediaan pangan ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani dan pendapatan yang lebih merata di wilayah perdesaan. (Dr. Ir. I ketut kariyasa, M.Si)

KEMANTAN GULIRKAN PROGRAM KURANGI RESIKO GAGAL PANEN AKIBAT KEKERINGAN



Kementerian Pertanian melalui Sistem Informasi Peringatan Dini dan Penanganan Perubahan Iklim pada sektor pertanian (Si-Perditan) telah menginformasikan potensi kekeringan yang akan melanda di sebagian besar daerah di Indonesia. Puncak musim kemarau akan terjadi di bulan Agustus – Oktober 2019 dan akan mulai musim hujan di bulan November 2019. Jadi ada pergeseran musim hujan 1-2 bulan yang biasanya terjadi musim hujan di bulan oktober.

Selanjutnya hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan hingga tanggal 20 Juni 2019 dan prakiraan peluang curah hujan sangat rendah (< 20 mm/10 hari), telah terjadi hari tanpa hujan (HTH) berturut-turut pada beberapa wilayah yang berdampak pada potensi kekeringan meteorologis (iklim) dengan status SIAGA hingga AWAS di beberapa daerah. Status

AWAS (telah mengalami HTH >61 hari dan prospek peluang curah hujan rendah <20mm/dasarian pada 20 hari mendatang >80%). Daerah-daerah dengan status AWAS di mulai dari Jawa Barat (Indramayu), sebagian besar Yogyakarta, Jawa Timur (Sampang dan Malang), Bali (Buleleng), dan sebagian besar Nusa Tenggara Timur. Status SIAGA (telah mengalami HTH >31 hari dan prospek peluang curah hujan rendah <20mm/dasarian pada 20 hari mendatang >80%) terjadi di Jakarta Utara, Banten (Lebak dan Tangerang), Nusa Tenggara Barat dan sebagian besar Jawa Tengah.

Menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG (Drs. Herizal, Msi.), wilayah yang telah memasuki musim kemarau meliputi: Aceh (pesisir utara dan timur), Sumatera Utara bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian tenggara, pesisir

barat Sulawesi Selatan, pesisir utara Sulawesi Utara, pesisir dalam perairan Sulawesi Tengah, sebagian Maluku dan Papua bagian selatan.

Berdasarkan hasil prakiraan beberapa Lembaga Internasional dan BMKG, kejadian perubahan iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan kondisi El-Nino Lemah, yang mana Anomali SST di wilayah Samudera Hindia menunjukkan kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung setidaknya hingga Januari 2020.

Dampak yang di timbulkan dari kekeringan (El-Nino Lemah) terhadap sektor pertanian adalah kegagalan panen dan penurunan produksi pertanian. Namun demikian pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah memprediksi kejadian kekeringan ini dan telah melakukan upaya penanggulangan. Upaya Kementerian Pertanian dalam penanggulangan dampak kekeringan adalah 1) pemberian bantuan pompa air, 2) membangun/rehabilitasi daerah irigasi tersier, 3) membentuk Brigade penanganan kekeringan di masing-masing daerah, 4) pembangunan embung, dam-parit, sumur dalam dan dangkal di beberapa daerah kekeringan, 5) mengembangkan Sistem Informasi Peringatan Dini dan Penanganan Perubahan Iklim pada sektor pertanian (Si-Perditan) berbasis webGIS yang mudah di akses oleh masyarakat khususnya petani.

Aplikasi Si-PERDITAN menyediakan fitur-fitur yang berisi: 1) peta informasi curah hujan secara real time tiap 1 jam dari citra satelit Himawari-8, 2) prediksi ENSO yakni terkait dengan prediksi kejadian kekeringan (el-nino) maupun banjir (la-nina) sampai 8 bulan ke depan, 3) prakiraan curah hujan 6 harian maupun prakiraan curah hujan bulanan selama 6 bulan ke depan yang sangat bermanfaat untuk perencanaan pola tanam, 4) peta potensi kebakaran lahan, 5) peta sebaran dan prakiraan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan, 6) peta sebaran monitoring tinggi muka air (TMA) yang ada di 180 waduk/bendungan dan 7) kamus yang berisikan penanganan OPT sehingga sangat bermanfaat buat petani untuk pengendalian OPT. Fitur-fitur informasi yang

ada dalam aplikasi Si-PERDITAN di buat secara dinamis dan interaktif serta berbasis geospasial.

“Dengan memanfaatkan fitur dalam aplikasi tersebut, maka persiapan dan perencanaan sebelum terjadinya kejadian bencana banjir maupun kekeringan dapat diantisipasi dan diadaptasi sehingga dapat mengurangi dampak kerugian akibat banjir maupun kekeringan”. Aplikasi Si-PERDITAN ini sangat bermanfaat buat pemangku kepentingan maupun petugas lapangan untuk menginformasikan perubahan iklim bagi masyarakat khususnya petani dalam rangka perencanaan resiko untuk mengurangi kegagalanpanendaturunnya produksipertanian.

Sistem ini berbasis webGIS dan mampu diakses melalui mobile browser yang dapat membantu pihak pengambil keputusan di Kementerian Pertanian maupun pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia serta dapat secara interaktif petani berkomunikasi dengan petugas pertanian dalam memperoleh bantuan terkait perencanaan pola tanam, penanganan dampak banjir dan kekeringan dan serangan OPT maupun penyakit hewan. Alamat website aplikasi Si-PERDITAN <http://sipetani.pertanian.go.id/siperditan/>. Sambutan positif terhadap sistem aplikasi Si-PERDITAN di sampaikan oleh petugas pertanian lapangan (PPL) dan pengamat organisme pengganggu tanaman (POPT) bahwa system ini sangat bermanfaat untuk perencanaan pola tanam dan system budidaya pertanian dalam mengurangi resiko kegagalan panen dan produksi pertanian. Hal ini di sampaikan pada saat dilakukan uji coba dan sosialisasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain pengembangan aplikasi Si-PERDITAN, kontribusi Pusdatin dalam pengembangan teknologi pertanian menuju era Industri 4.0 juga telah dilakukan sebelumnya bersama-sama dengan LAPAN yakni dalam pengembangan aplikasi pemantauan fase pertanaman padi berbasis citra satelit SIMOTANDI. (M. Subehi)

KOORDINASI DAN SOSIALISASI PENDATAAN SAPI/ KERBAU SECARA ONLINE DI PROVINSI JAWA TIMUR

24 JUNI - 6 JULI 2019



Tahun 2019, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan pendataan sapi/kerbau secara online. Pendataan lengkap dilakukan di 17 kabupaten/kota potensi sapi/kerbau, 339 kecamatan dan petugas yang terlibat berjumlah 796 orang. Sebelum petugas pendataan melaksanakan pendataan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dan sosialisasi “Metode Pendataan Sapi/ Kerbau Secara Online di Provinsi Jawa Timur”.

Koordinasi dan sosialisasi pendataan sapi/kerbau akan dilakukan 2 tahap yaitu tahap ke - 1 dimulai dari tanggal 24 - 29 Juni dan tahap ke - 2 dimulai dari tanggal 1-6 Juli 2019. Pendataan tahap ke - 1 dilakukan di 8 kabupaten dimana tahap ke - 1 ini dibagi menjadi 2 tim yaitu, Tim 1 Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bondowone, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang dan Tim 2 Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Magetan.

Pendataan tahap ke - 2 dilakukan di 7 kabupaten dan 2 kota dimana tahap ke - 2 ini juga dibagi menjadi 2 tim yaitu Tim 1 Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Batu dan Tim 2 Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Magetan. Setiap tim akan melibatkan Pusdatin, Sekditjen PKH dan tim iSIKHNAS.

Koordinasi dan sosialisasi pendataan sapi/ kerbau dilaksanakan di kantor dinas

peternakan kabupaten/ kota ataupun di kantor rumah potong hewan (RPH). Koordinasi dan sosialisasi secara umum dibagi 2 sesi. Sesi pertama pertemuan koordinasi diisi dengan penyamaan persepsi tentang pendataan populasi sapi / kerbau di lapangan, dengan beberapa hasil diskusi sebagai berikut :

- Pendataan sapi / kerbau dilakukan untuk kondisi populasi per tanggal 1 Juli 2019 pada semua rumah tangga ternak / perusahaan / instansi / unit usaha / dan lain-lain yang mengusahakan atau memelihara ternak sapi / kerbau.
- Pendataan sapi / kerbau dibedakan atas jenis kelamin dan umur.
- Sapi yang dimiliki oleh blantik atau yang berada di kandang RPH yang akan dipersiapkan untuk dipotong tidak masuk dalam pendataan kegiatan ini.
- Sapi / kerbau yang dimiliki oleh blantik / pedagang untuk dibesarkan sebelum dijual dicacah ke dalam kegiatan pendataan ini.
- Jika ada peternak yang menitipkan ternaknya pada orang lain (gaduan) maka yang ditulis di kuesioner L-DSK19 adalah “nama pemilik/pemelihara ternak”.
- Jika ada peternak yang menitipkan ternaknya pada kelompok maka dikuesioner dituliskan nama kelompok tersebut. Tetapi jika pemeliharannya sudah dibagi ke anggota kelompok dan pemeliharaan sudah dilakukan oleh anggota kelompok maka yang dicatat adalah masing-masing anggota yang memelihara, meskipun kandangnya menggunakan kandang kelompok.
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian kuesioner : 1) Pengisian kuesioner menggunakan pensil dan ditulis dengan huruf

capital. 2) Jika tidak ada populasi sapi atau kerbau di suatu desa maka dituliskan 0 (nol) dan tetap dilaporkan ke iSIKHNAS sebagai 0.

Sesi kedua pertemuan koordinasi dilakukan untuk mendiskusikan tatacara pengiriman hasil pendataan di lapangan kedalam sistem iSIKHNAS, dengan beberapa hasil diskusi sbb.:

- Data yang dikirimkan ke iSIKHNAS adalah rekapitulasi atau total populasi sapi/kerbau per desa.
- Petugas yang akan melaporkan data hasil pendataan dilapang adalah semua petugas kecamatan.
- Secara umum peserta pelatihan sudah paham tentang metode dan pengiriman data secara online, karena petugas pada umumnya petugas IB yang selalu mengirimkan data berkaitan dengan IB ke iSIKHNAS.
- Beberapa petugas baru yang belum terdaftar di iSIKHNAS telah didaftarkan nama dan nomor handphone yang akan digunakan untuk mengirimkan data ke iSIKHNAS.
- Pada umumnya, petugas sudah memiliki handphone berbasis android sehingga pengiriman data menggunakan web base ke alamat realtis.isikhnas.com, dan bisa juga pengiriman berbasis short message service (sms) ke nomor 0812 900 9000 9 atau 0811 138 311 5.

Hasil pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi menunjukkan bahwa ke-17 kabupaten / kota sangat mengapresiasi. Mereka mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan ini dalam rangka memperoleh data populasi sapi dan kerbau secara akurat dan terkini. Data yang akurat dan terkini sangat diperlukan guna mendukung pembangunan di sektor peternakan. Kepala Dinas / Sekretaris Dinas / Kepala Bidang Program Kabupaten / Kota antusias untuk menerapkan pendataan variabel / ternak lain. Seperti pematangan, penjualan / pembelian, ternak unggas (ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam kampung, Itik), ternak kecil (kambing & domba), dan lain-lain secara online berbasis android di tahun mendatang. Beberapa kabupaten sudah menerapkannya, seperti Kabupaten Banyuwangi dengan E-nak dan Sisapi di Kabupaten Lamongan. Pengumpulan data populasi sapi/ kerbau oleh petugas kecamatan menggunakan kuesioner L-DSK19 yang berisi informasi peternak dan jumlah ternak per desa. Rekap data di tingkat kecamatan dan kabupaten dilakukan oleh petugas kabupaten menggunakan kuesioner RC-DSK19 dan RK-DSK19.

Rekap data tingkat provinsi dilakukan oleh petugas provinsi menggunakan RP-DSK19.

Petugas yang terlibat pendataan ini adalah petugas IB dan petugas data kecamatan/ kabupaten non IB, petugas teknis peternakan (PTP). Petugas IB umumnya memiliki SPIB yang mengatur wilayah kerja masing-masing petugas, dengan adanya penambahan petugas pendataan yang bukan petugas IB maka perlu adanya koordinasi antara koordinator iSIKHNAS di tingkat kabupaten dengan petugas pendataan kabupaten untuk mengalokasikan wilayah kerja untuk setiap petugas pendataan, agar tidak terjadi tumpang tindih pendataan dalam wilayah/desa yang sama.

Perlu adanya verifikasi ulang terhadap no hp petugas, karena petugas IB yang telah terdaftar di iSIKHNAS mencantumkan no hp baru. Sesuai ketentuan dalam sistem iSIKHNAS, untuk 1 no hp tidak bisa digunakan untuk 2 identitas petugas yakni petugas IB sekaligus petugas pendataan. Tetapi permasalahan ini telah diselesaikan oleh petugas IT dari Tim iSIKHNAS Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pendataan populasi sapi dan kerbau bisa dilakukan mulai tanggal 1-13 Juli 2019 namun jika belum selesai masih diberi waktu hingga tanggal 30 Juli 2019. Pelaporan data ke iSIKHNAS dilakukan pada 14-31 Juli 2019, namun jika sebelum tanggal 14 Juli 2019 sudah selesai pendataan satu desa maka bisa langsung dilaporkan ke iSIKHNAS dan itu lebih baik supaya pelaporannya lebih mudah. Pendataan dilakukan serentak di seluruh kecamatan untuk menghasilkan data peternak dan jumlah ternak by name by address dimana jumlah sapi/ kerbau yang didata adalah populasi per 1 Juli 2019.

Pengawas Kabupaten akan mengawal kegiatan pendataan sapi/kerbau di lapang dan membuat rekap desa di setiap kecamatan menggunakan formulir RC-DSK19 dan membuat rekap kecamatan dengan menggunakan formulir RK-DSK19. Petugas Propinsi akan mengawal kegiatan pendataan sapi/kerbau di lapang dan membuat rekap provinsi untuk 17 kabupaten/ kota menggunakan formulir RP-DSK19. Petugas Kabupaten telah mengalokasikan dokumen L-DKS19 sesuai dengan kebutuhan, namun demikian apabila terjadi kekurangan alokasi Formulir L-DSK19 dari Pusdatin petugas dimohon digandakan terlebih dahulu dan biayanya akan diganti oleh Dinas Peternakan. (Roch W)

KEAMANAN INFORMASI, AJA AYU!

Apa jadinya, ketika Bandara Soekarno Hatta, berada dalam situasi darurat seperti dalam film “Die Hard”? Itu belum seberapa dilihat dari eskalasi kegawatannya. Atau, begini...bagaimana jika seluruh kota Jakarta dibuat kacau, seperti di sekuel film Die Hard berikutnya, yaitu “Die Hard-4: Live Free Or Die Hard”. Wah, bakal dobel pangkat dua gawatnya dong ya.. Bayangkan saja, hampir semua obyek vital hingga strategis, dan fasilitas umum hingga militer, bisa dibobol oleh teroris. Tidak hanya sampai disitu, teroris pun berhasil mengendalikan dari jarak jauh obyek-obyek vital supaya lebih memperkeruh keadaan di dalam negeri.

Mungkinkah adegan teroris menguasai obyek-obyek vital tersebut terjadi di kehidupan nyata? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kemungkinannya iya-nya lebih besar. Yang pasti, film tersebut telah membuka wawasan bahwa Internet of Things (IoT) mempunyai risiko keamanan yang cukup kritis jika diimplementasikan pada beberapa obyek vital yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Seperti diketahui, bahwa di titik hulu paling ujung dari IoT adalah infrastruktur pendukung jaringan internet. Dari segi pengelolaan, infrastruktur tersebut sebenarnya mirip dengan pengelolaan infrastruktur penyedia TIK lainnya. Saat ini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik agar aman dari ancaman baik dari dalam atau dari luar. Pada awalnya, sistem komputer di Amerika Serikat hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan informasi. Namun hal tersebut berubah drastis ketika sejumlah instalasi keamanan komputer dirusak oleh para pemrotes perang Vietnam. Pengalaman ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan informasi yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kerusakan atau kehancuran serta menyediakan suatu perangkat organisasi khusus yang khusus ditujukan untuk melanjutkan kegiatan operasional jika terjadi gangguan. Jika berbicara tentang keamanan sistem informasi, selalu kata kunci yang dirujuk

adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker dan lain-lain. Padahal berbicara masalah keamanan sistem informasi adalah pencegahan kemungkinan adanya resiko yang muncul atas sistem tersebut. Selanjutnya pembicaraan tentang keamanan sistem tersebut akan mengerucut kepada ancaman dan kelemahan atas sistem. Selanjutnya 2 isu utama tersebut akan berdampak kepada 6 hal dalam sistem informasi yaitu : Efektifitas, Efisiensi, Kerahaasiaan, Integritas, Keberadaan (availability), Kepatuhan (compliance), dan Keandalan (reliability).

Adapun kriteria yang perlu di perhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi adalah sebagai berikut 1) Akses kontrol sistem yang digunakan, 2) Telekomunikasi dan jaringan yang dipakai, 3) Manajemen praktis yang di pakai, 4) Pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, 5) Cryptographs yang diterapkan, 6) Arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan, 7) Pengoperasian yang ada, 8) Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP), 8) Kebutuhan Hukum, bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan, dan 9) Tata letak fisik dari sistem yang ada.

Keamanan informasi pada suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian utama. Namun apakah kriteria penerapan keamanan informasi di organisasi telah memenuhi kelengkapan dan kematangan yang sesuai dengan standar?

Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa dan mengevaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi sesuai dengan kriteria pada SNI ISO/IEC 27007, serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah (Kemenkominfo, 2013). Adapun area yang dimaksud yaitu, 1) Tata Kelola; 2) Pengelolaan Risiko; 3) Kerangka Kerja; 4) Pengelolaan Aset; 5) Aspek Teknologi.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan

yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi (Badan Siber dan Sandi Negara, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 4 tahun 2016, tentang sistem manajemen pengamanan informasi, disebutkan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa : 1) Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain (bab I, pasal 1, butir 2); dan 2) Sistem Manajemen Pengamanan Informasi adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan asas Risiko (bab I, pasal 1, butir 5).

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertanian, dan salah satu fungsinya yaitu : 1) Penyiapan pembinaan dan pengembangan,

serta pengelolaan sistem jaringan komputer; 2) Penyiapan pembinaan dan pengembangan, serta sosialisasi aplikasi sistem informasi, aplikasi multimedia dan website.

Hal tersebut menjadikan Pusdatin sebagai penyelenggara kategori sistem elektronik strategis. Sehingga selanjutnya, secara organisasi sebenarnya harus diberlakukan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi sebagaimana yang tertuang di dalam Permenkominfo nomor 4 tahun 2016.

Lalu apa hubungannya dengan film-film Die Hard diatas?

Kelak jika Pusdatin diberi amanah sebagai “penjaga gawang” IoT di lingkup Kementerian Pertanian, maka pertahanan dan keamanan dari serangan-serangan teroris dunia-maya menjadi isu penting yang harus dikedepankan. Perencanaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan penguasaan serta penerapan teknologi yang sesuai, hingga tata kelola harus dibuat sematang mungkin. Sehingga penerapan optimal keamanan informasi, dapat meminimalkan dampak dari risiko dan ancaman yang mungkin timbul. Jadi, masih mau..terus berada di zona nyaman, namun tidak aman?

Disadur dari berbagai sumber.
(Apriadi Setiawan)

PEMANFAATAN WEB SERVICE UNTUK PENYEDIAAN DATA DI KEMENTERIAN PERTANIAN

Perkembangan teknologi informasi sudah menjadi salah satu kebutuhan utama pada bidang pemerintahan saat ini. Demi memenuhi kebutuhan proses bisnis antar instansi yang ada pada Kementerian Pertanian, beragam sistem informasi telah dikembangkan. Mulai dari sistem informasi yang memiliki fungsi utama untuk menyediakan data sampai dengan sistem informasi yang menggantikan proses bisnis yang selama ini dilakukan dengan cara manual demi efisiensi proses bisnis dalam instansi terkait.

Integrasi antar sistem informasi pun menjadi tantangan tersendiri bagi perancang sistem. Begitu banyak sistem informasi yang telah dikembangkan namun sumber data dari masing-masing sistem tidak saling terhubung, sehingga dimungkinkan sebuah data yang sama tersimpan pada basis data yang berbeda. Hal ini tentu menyebabkan suatu penyimpanan data yang tidak efisien. Sehingga diperlukan sebuah metode pertukaran data antar sistem tanpa harus melakukan akses secara langsung

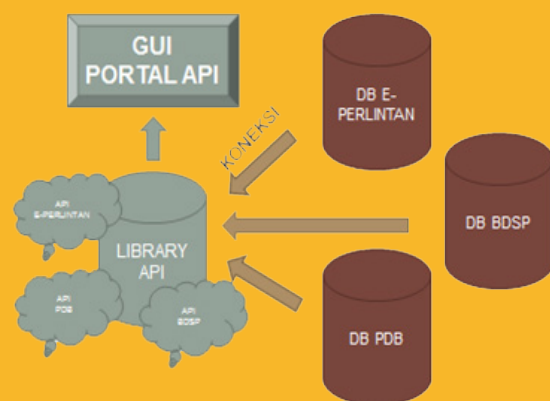
pada basis data terkait. Selain tidak efisien nya penyimpanan data, masing-masing sistem memiliki *driver* basis data yang berbeda-beda sehingga tentu tidak semua sistem dapat dilakukan akses ke basis data secara langsung. Oleh karena itu diperlukan sebuah konsep pemanfaatan sistem pertukaran data yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satu konsep pertukaran data yang saat ini banyak digunakan oleh perancang sistem adalah dengan memanfaatkan *web service*. Kelebihan dari *web service* ini adalah konsep ini bisa lintas *platform*, memiliki sebuah bahasa tersendiri sehingga tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu, dan yang terakhir adalah dapat menjadi jembatan penghubung dengan basis data sebuah sistem informasi tanpa perlu menggunakan *driver* basis data terkait.

Beberapa sistem yang telah dikembangkan oleh Pusdatin saat ini sudah memanfaatkan konsep tersebut dengan memanfaatkan JSON sebagai format pertukaran data yang universal. Sistem Informasi yang telah menerapkan konsep pertukaran data ini dengan cukup baik adalah pada Sistem Informasi kepegawaian seperti SIM-ASN, e-Personal, e-Kinerja, dan sistem kepegawaian lainnya. Sehingga, seluruh sistem informasi yang berkaitan dengan data pegawai dapat langsung diambil datanya dari basis data SIM-ASN secara *real-time*.

Tidak terbatas pada sistem informasi kepegawaian saja, namun konsep pertukaran data ini juga sudah digunakan pada sistem informasi aplikasi spesifik pertanian seperti pada E-Perlindungan Kelembagaan yang memiliki data dasar kelembagaan perlindungan tanaman pangan seperti POPT, LPHP, Brigade, Petani Pengamat, dsb yang digunakan sebagai data dasar untuk aplikasi tanaman pangan lainnya seperti Laporan-OPT Publik yang berbasis *mobile apps*. Pada implementasinya ketika pengguna publik melakukan pelaporan Serangan OPT, maka akan otomatis disediakan data kontak POPT pada wilayah pelaporan yang diambil secara *real-time* dari E-Perlindungan Kelembagaan.

Tidak hanya digunakan sebagai pertukaran data antar sistem internal yang ada pada Kementerian Pertanian, namun pemanfaatan *web service* kedepannya akan digunakan sebagai sarana penyediaan data untuk pihak eksternal dengan menggunakan sebuah Sistem Informasi Portal API yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pusdatin Kementerian Pertanian. Dimana pengguna publik dapat melakukan permintaan *web service* pada data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian yang bersifat publik seperti pada sistem informasi basis data yang terdapat pada website Kementerian Pertanian.

Skema pertukaran data dalam PORTAL API



Kumpulan *Web Service* yang diintegrasikan dalam satu pustaka *Web Service* harus disediakan alur permintaan yang jelas terkait dengan peran pengguna dan admin yang akan ditampilkan dalam sebuah Sistem Informasi Portal API. Hal ini diperlukan terkait dengan permintaan dari berbagai pihak eksternal maupun internal yang membutuhkan data *real-time* untuk pengembangan dashboard maupun sistem informasi. Selain sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pada publik, dengan adanya Sistem Informasi Portal API pihak Pusdatin dapat memantau pemanfaatan data-data Pertanian secara langsung terkait dengan apa saja data yang digunakan dan siapa saja yang menggunakan *web service* tersebut. (Brantas)

INFO DATA PERTANIAN

1. INFLASI

Pada Juli 2019 terjadi inflasi sebesar 0,31 persen. Dari 82 kota, 55 kota mengalami inflasi dan 27 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 1,88 persen dengan IHK 148,33 dan terendah terjadi di Makassar sebesar 0,01 persen dengan IHK 139,39. Inflasi Juli 2019 sebesar 0,31 persen, lebih tinggi dibanding kondisi Juli 2018 yang mengalami inflasi sebesar 0,28 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2019 sebesar 2,36 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2019 terhadap Juli 2018) sebesar 3,32 persen.

2. NILAI TUKAR PETANI (NTP), INFLASI PERDESAAN DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN (NTUP)

- NTP Juli 2019 tercatat 102,63 atau naik sebesar 0,29 persen dibanding NTP Juni 2019 sebesar 102,33. Kenaikan NTP bulan ini disebabkan naiknya NTP di tiga subsector penyusun NTP, yaitu Tanaman Pangan (0,36 persen), Tanaman Hortikultura (0,61 persen), dan Peternakan (0,67 persen).
- Pada Juli 2019 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,60 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan It (0,70 persen) lebih besar dibandingkan dengan kenaikan BPPBM (0,10 persen). Dari lima subsektor penyusun NTUP, kenaikan terjadi di tiga subsektor, yaitu Tanaman Pangan (0,73 persen), Tanaman Hortikultura (0,89 persen), dan Peternakan (0,92 persen)

3. PERTUMBUHAN PDB

- Ekonomi Indonesia triwulan II-2019 dibanding triwulan II-2018 tumbuh sebesar 5,05 persen (y-on-y).
- Ekonomi Indonesia triwulan II-2019 dibanding triwulan I-2019 tumbuh sebesar 4,20 persen (q-to-q).
- Ekonomi Indonesia pada Semester I-2019 dibanding semester I-2018 tumbuh sebesar 5,06 persen (c-to-c)

4. UPAH BURUH TANI

UPAH BURUH TANI

JUNI 2019
RP. 54.152,00



0,18%



5. LUAS PANEN DAN PRODUKSI

- Luas panen padi di Indonesia periode Januari–September 2018 sebesar 9,54 juta hektar. Dengan memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, maka luas panen tahun 2018 adalah 10,90 juta hektar.
- Produksi padi di Indonesia periode Januari–September 2018 sebesar 49,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Berdasarkan potensi produksi sampai Desember 2018, maka diperkirakan total produksi padi tahun 2018 sebesar 56,54 juta ton GKG.
- Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras dengan menggunakan angka konversi GKG ke beras tahun 2018, maka produksi padi tersebut setara dengan 32,42 juta ton beras. Sumber BPS



REDAKSI

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Tim Redaksi

Pengarah :

Kapusdatin

Penasehat :

Kepala Bagian Umum

Penanggung Jawab :

Kasubag Pelayanan dan Publikasi Data

Redaktur :

Dhanang Susatyo, SE

Editor :

Hani Hanifah R, S, Kom

Dra. P. Hanny Muliary, MM

Budi Setiono

Agus Sumantri, S.Sos

Fotografer :

Sri Lestari, ST

Iswadi

Desain Grafis :

Cahyani Wartianingsih, S.Kom

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT

Sekretaris :

Eli David, S.Sos, MM

Hotlanis Mangatur Sibarani, S.Kom

Musdino

Suparmi

Alamat Redaksi :

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Jl. Harsono RM No.3 Gd D Lantai IV Pasar Minggu - Jakarta 12550

Telp : 021- 7805305, 7816384, Fax : 021 - 7822638, e-mail : newsletter@pertanian.go.id